

Islam dan Etnonasionalisme Teungku Hasan Muhammad Tiro untuk Perjuangan Aceh Merdeka 1976 - 1998

Avicenna Al Maududdy¹, Usman², Munawiyah Abdullah³, Teuku Luthfi Ashri⁴

¹ Magister Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Adab dan Ilmu Budaya, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia.

² Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Abulyatama, Indonesia.

³ Program Studi Sejarah dan Kebudayaan Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, Indonesia.

⁴ Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3, Banda Aceh, Indonesia.

¹ Correspondance Email: 22201021002@student.uin-suka.ac.id

Article Info

Article history:

Received: December 27, 2023

Revised: June 29, 2024

Accepted: July 09, 2024

Keywords:

Islamic;

Ideology;

Ethnonationalism;

Free Aceh Movement.

Kata Kunci:

Islam;

Ideologi;

Etnonasionalisme;

Gerakan Aceh Merdeka.

ABSTRACT

Inspired by the richness of Aceh's cultural heritage, reconstructing Aceh's identity on the basis of ethnic nationalism. Reconstructing history and arousing collective sentiments of the Acehnese people to spread their ideas. His way of thinking views Islam as one of the components of customs that form Aceh's customary law or from an Islamic political perspective. Furthermore, the Acehnese people are presented as historical facts or realities of life in society, and Islam is presented as a religion with noble principles for its people to fight against evil and injustice. This study takes a political approach by conducting historical investigations. The purpose of this study is to analyze Teungku Hasan M. Tiro's thoughts on Islam and ethnonationalism in the context of the struggle for Aceh's Independence. Literature study with literature analysis is a method of data collection for the purpose of this study. The data collected is then reviewed and then written into one complete article. How the Acehnese Revolution in the struggle for Aceh's Independence, how Teungku Hasan M. Tiro's leadership in the struggle, and why his views on Islam and his ideas of ethnonationalism influenced the struggle for Aceh's Independence will be discussed in this study. The ethnonationalist thought or also known as Acehnese Nationalism of Teungku Hasan M. Tiro which was mobilized in the struggle for Aceh Merdeka has defined the identity of the Acehnese nation in maintaining Aceh's sovereignty. Although there are different opinions about the purpose of establishing an independent Acehnese state, his efforts and beliefs are very beneficial for the continuity of Aceh's political life today.

ABSTRAK

Terinspirasi oleh kekayaan warisan budaya Aceh, merekonstruksi identitas Aceh atas dasar nasionalisme etnis. Merekonstruksi sejarah dan membangkitkan sentimen kolektif masyarakat Aceh untuk menyebarkan gagasannya. Cara berpikirnya memandang Islam sebagai salah satu komponen adat yang membentuk hukum adat Aceh atau dari sudut pandang politik Islam. Selanjutnya masyarakat Aceh ditampilkan sebagai fakta sejarah atau realitas hidup di masyarakat, dan Islam ditampilkan sebagai agama dengan prinsip-prinsip luhur bagi umatnya untuk melawan kemungkaran dan kezaliman. Kajian ini mengambil pendekatan politik dengan melakukan penyelidikan sejarah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pemikiran Teungku Hasan M. Tiro tentang Islam dan etnonasionalisme dalam konteks perjuangan Aceh Merdeka. Studi literatur dengan analisis kepustakaan ialah metode pengambilan data untuk tujuan penelitian ini. Data yang dikumpulkan kemudian ditelaah dan kemudian ditulis menjadi satu artikel yang utuh. Bagaimana Revolusi masyarakat Aceh dalam perjuangan Aceh Merdeka, bagaimana kepemimpinan Teungku Hasan M. Tiro dalam perjuangan tersebut, dan mengapa pandangannya terhadap Islam dan gagasan etnonasionalismenya berpengaruh terhadap perjuangan Aceh Merdeka akan dibahas dalam penelitian ini. Pemikiran Etnonasionalisme atau dikenal juga sebagai Nasionalisme Aceh Teungku Hasan M. Tiro yang dimobilisasi dalam perjuangan Aceh Merdeka telah mendefinisikan jati diri bangsa Aceh dalam mempertahankan kedaulatan Aceh. Meskipun ada pendapat yang berbeda tentang tujuan mendirikan negara Aceh merdeka, upaya dan keyakinannya sangat bermanfaat bagi kelangsungan kehidupan politik Aceh masa sekarang.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



1. PENDAHULUAN

Kerajaan Aceh memposisikan Islam sebagai dasar negara sebagaimana tercantum dalam Konstitusi Kerajaan yakni *Qanun Meukuta Alam Al Asyi Dar'assalam*. Dalam salinan Orang Kaya *Wazir Rama Seutia Keurukon Kitabul Muluk Aceh Darussalam* (Menteri Sekretaris Kerajaan Aceh Darussalam) Said Abdullah di Meulik bin Habib Ahmad al Jamalullail, berbunyi: bahwa kita semua berasal dari satu negeri yang disebut Aceh, yang bermakna satu negeri, bangsa, kerajaan, dan alam yang disebut bendera Aceh Darussalam, dan satu ajaran yang disebut Islam. Kita mengikuti Ahlussunnah waljamaah menjalankan perintah Rasulullah Nabi Muhammad dengan menggunakan hukum al Quran, Hadist, Qias, dan Ijmak dari ulama ahlussunnah waljama'ah. Selain itu, kita mengintegrasikan dengan hukum, adat, *reusam* (adab), dan qanun (undang-undang), yaitu hukum Allah dan hukum Rasulullah, baik di dunia maupun di akhirat.

Kenyataan ini sejalan dengan pendapat Teungku Hasan M. Tiro, yang menyatakan bahwa hukum Islam adalah dasar penilaian segala sesuatu di Aceh. Islam adalah bagian integral dari Aceh. Islam adalah sisi lain Aceh. Sejak awal berdirinya sebagai negara kerajaan Islam, Aceh telah menganut hukum Islam sebagai dasar negara dan filosofi hidup rakyatnya (Teungku Hasan di Tiro, 1984: 124). Dalam catatan hariannya, menyatakan dengan tegas bahwa agama Islam mengajarkan bahwa negara harus tunduk kepada hukum-hukum Allah untuk mengukuhkan gagasan Islam dalam politik yang dia perjuangkan. Islam pada dasarnya bertujuan untuk membuat manusia bermoral. Karena itu, dia menganggap perbedaan agama-negara, moralitas, dan ekonomi sebagai gejala *skizofrenia*. Karena dengan memisahkan negara dari agama berarti menolak konsep negara Islam secara keseluruhan (Teungku Hasan di Tiro, 1984: 96). Jalan hidup bangsa Aceh adalah hidup dengan mulia, berdasarkan sejarah ribuan tahunnya. Teungku Hasan M Tiro mengatakan bahwa lebih baik mati untuk membangun kemuliaan agama Islam, bangsa, dan negeri Aceh ini daripada hidup menjadi budak bangsa lain. Rakyat Aceh harus mempertimbangkan kembali posisi dan kepentingan Aceh dalam hal agama, politik, ekonomi, adab, dan hukum. Kemerdekaan adalah sumber kemakmuran, kemuliaan, dan kemajuan (Teungku Hasan M. di Tiro, 1968: 99). Namun, pandangan politik Teungku Hasan M Tiro, perjuangan ini merupakan bagian dari tanggung jawab orang Aceh sebagai identitas bangsa, yang bertujuan untuk menjaga kepentingan bangsa Aceh dan menciptakan kepentingan nasional Aceh.

Semua ini tidak dapat dicapai jika Aceh tidak memiliki kemerdekaan. Menurut Teungku Hasan M Tiro, semua tindakan saat ini harus meminta izin dari pemerintah di Jawa. Investasi dari Amerika dan Eropa untuk Aceh harus meminta izin dari pemerintah Indonesia yang berpusat di Jawa jika mereka ingin melakukannya. Ini menunjukkan bahwa mereka percaya bahwa Aceh adalah wilayahnya dan bahwa kita, orang Aceh, adalah budaknya. Selain itu, perizinan tidak akan diberikan jika tidak ada manfaat bagi orang seberang atau manfaat yang dapat membuat Aceh menjadi makmur dan kuat kembali (Teungku Hasan M. di Tiro, 1968: 101).

Kemakmuran negara tidak datang dengan sendirinya tanpa usaha; itu hanya terjadi ketika pemerintahan merdeka. Mengendalikan apa yang di perlukan oleh masyarakat tanpa ada yang larang menghitung dan memiliki kemampuan untuk melakukan yang terbaik untuk negaranya sendiri tanpa meminta bantuan dari negara lain untuk kemakmurannya. Untuk memperoleh kemakmuran dan kedaulatan Aceh, Teungku Hasan m Tiro membentuk gerakan perjuangan bernama Aceh Merdeka (AM). Pemerintahan yang memiliki tujuan adalah kekuasaan yang tidak dikontrol oleh bangsa lain dan tidak bertanggung jawab kepada Pemerintahan di seberang lautan (Teungku Hasan M. di Tiro, 1968: 97).

Ensiklopedi Indonesia, dikatakan bahwa kata "etnos" dan "nasionalisme" adalah etimologi dari istilah "etnonasionalisme". Nasionalisme berarti sikap sosial dan politik dari negara-negara yang memiliki kesamaan budaya, adat, agama, dan bahasa, serta memiliki kesetiaan yang sama. Sebaliknya, "etnik" berarti kelompok sosial yang memiliki posisi tertentu dalam struktur sosial dan kebudayaan berdasarkan tradisi, agama, bahasa, dan keturunan mereka (Fadlullah, 2020: 8). Jika negara mengakui budaya atau etnis sebuah komunitas sebagai sumber politik, itu disebut sebagai etnonasionalisme (Santoso et al., 2023).

Pandangan etnonasionalisme Teungku Hasan M Tiro dimulai dengan membangunkan kesadaran ke-Acehan, kita Aceh satu bangsa dalam bagian dunia. Satu bangsa hidup selalu walaupun anggota satu persatu mati, satu bangsa tetap seperti semula walaupun keturunan silih berganti, satu bangsa tidak tua, selalu muda walaupun satu persatu anggota menjadi tua. Karena itu kita bangsa Aceh dimasa ini sama dengan bangsa Aceh dimasa 100 atau 1000 tahun yang lalu atau dimasa akan datang. Moyang kita yang telah wafat telah digantikan oleh kita, dan kita akan digantikan oleh keturunan Aceh kedepannya, begitu terus sampai kiamat dunia. Darah moyang mengalir didalam tubuh kita, kita berbicara dengan bahasa yang diajarkan oleh moyang. Begitu juga kita yang tau adat, qanun, *reusam* (adab) dan agama yang mengatur kehidupan kita mulai dari lahir hingga kita wafat. Hidup kita bukanlah hidup sendiri-sendiri atau masing-masing tetapi hidup bersaudara, berkaum dan berbangsa (Teungku Hasan M. di Tiro, 2014: 56-57).

Tulisannya tentang sejarah Aceh menunjukkan bahwa dia menggunakan kesadaran keacehan sebagai alat politik untuk melawan Indonesia. Hampir semua tulisannya tentang sejarah Aceh menyimpang dari sejarah Indonesia dengan menggunakan berbagai alasan ilmiah untuk mengkritik sejarahnya dan mengembangkan perspektif baru tentang apa itu keragu-raguan yang pada akhirnya membuat nasionalisme Indonesia menjadi sesuatu yang tidak boleh diterima oleh masyarakat masyar. mengembalikan rasa superioritas kompleks masyarakat Aceh setelah perang dengan Belanda dan meningkatkan kesadaran sejarah, secara bersamaan membangun kembali identitas Aceh yang hilang karena kolonisasi Belanda melalui falsafah *turi droe* (kenali diri) dan *tusoe droe* (tau diri) untuk bangsa Aceh (Teungku Hasan M. di Tiro, 1968: 5).

Teungku Hasan M Tiro mempopulerkan etnonasionalisme Aceh karena sejarah peradaban Aceh yang hebat kemudian merekonstruksi sejarah Aceh dan membangkitkan perasaan kolektif untuk menyebarkan ideologinya ini. Dia melihat Islam dari sudut pandang sosiologi politik Islam, atau sebagai bagian dari adat istiadat masyarakat Aceh. Ini menunjukkan Islam sebagai nilai-nilai luhur yang mendorong orang untuk berjuang (Jihad) melawan kebatilan, amar ma'ruf nahi munkar, dan dengan rasa kesetaraan sesama warga Aceh. Ini menunjukkan bahwa Aceh adalah kisah di masa lalu, atau mungkin masih ada (Teungku Hasan Muhammad di Tiro, 1985: 23). Adapun yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini adalah perkembangan masyarakat Aceh dalam perjuangan Aceh Merdeka dan bentuk peranan dan kepemimpinan Teungku Hasan M. Tiro dalam perjuangan Aceh Merdeka serta bagaimana pemikiran Teungku Hasan M Tiro tentang Islam dan etnonasionalisme Aceh hingga pengaruhnya terhadap Aceh Merdeka.

2. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan mengkaji sumber literatur yang relevansi dengan penelitian. Studi literatur dengan analisis kepustakaan ialah metode pengambilan data untuk tujuan penelitian ini. Sumber utama (primer) penelitian ini berasal dari karya ilmiah dan dokumen arsip Teungku Hasan M Tiro. Selain itu, sumber sekunder dari kepustakaan diambil dari literatur yang mendukung dari berbagai sumber, seperti buku, laporan penelitian, dan jurnal ilmiah. Selain itu, data dikumpulkan dan ditelaah dari sejumlah literatur ini kemudian disusun dan ditulis dalam satu artikel jurnal yang utuh.

Proses mengumpulkan data tulisan ini menggunakan metode sejarah. Dalam metode sejarah, langkah pertama adalah heuristik, artinya mengumpulkan informasi sejarah dari literatur sebelumnya yang dianggap relevan. Selanjutnya, sumber-sumber ini dievaluasi secara kritis untuk memastikan bahwa sumber-sumber yang disebutkan di atas tentang Islam dan Etnonasionalisme Teungku Hasan M Tiro benar dan valid. Langkah selanjutnya adalah menginterpretasikan sumber dan fakta sejarah tersebut. Terakhir, langkah historiografi, yang berarti menulis tentang Pemikiran Teungku Hasan M Tiro untuk perjuangan Aceh Merdeka.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Masyarakat Aceh Dalam Perjuangan Aceh Merdeka

Sebagai bagian dari Nama Aceh berubah menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia karena keistimewaan. Mulai dengan nama Aceh Darussalam dari 1511 hingga 1959, diubah menjadi Daerah Istimewa Aceh dari 1959 hingga 2001, kemudian Nanggroe Aceh Darussalam hingga 2009, dan akhirnya kembali menjadi Aceh dari 2009 hingga sekarang. Ada banyak nama untuk Aceh, baik konstruktif maupun destruktif. Serambi Mekkah dan Daerah Modal adalah nama konstruktifnya, dan Daerah Konflik (1976-2005) adalah nama destruktifnya (Suadi Zainal, 2022: 88).

Melihat dan memahami masalah saat ini, termasuk kebangkitan Etnis setiap negara menjadi tantangan yang sulit untuk dihindari, termasuk di Indonesia (Putra & Yusuf, 2020: 159). Jika politik identitas etnis individu tidak sesuai dengan ras bangsa; solidaritas antara etnis sangat penting, khususnya dalam hal penentu masa depan. Jika politik negara tidak lagi sejalan dengan kesadaran etnis, nasionalisme etnis akan muncul (Darsono, 2021: 63). Jiwa Patriotik Rakyat Aceh dalam menentang Belanda, sehingga Belanda menganggap budaya Aceh buruk. Dengan kata lain, hampir tidak melibatkan fanatisme agama, dan menempatkan penekanan yang kuat pada identitas religius.

Sampai saat ini, deskripsi yang luar biasa tentang "identitas budaya" ini masih digunakan, mengingat perbedaan etnis dan aspirasi sebagai wilayah Islam. Perjuangan GAM Teungku Hasan M. di Tiro adalah perjuangan untuk membangun Negara Aceh Sumatera berdasarkan hukum Syariah Islam yang didasarkan pada mazhab Syafi'i. Dengan diberinya otoritas untuk menerapkan Syariat Islam dalam pemerintahan Provinsi Aceh, maksud dan tujuan perjuangan GAM hampir mencapai 75%.

Konsep Negara Islam yang diperjuangkan adalah Negara Islam yang merdeka dan berdaulat atas Aceh sebagai penerus Negara. Ini akan mengembalikan kedaulatan Aceh seperti sebelum invasi Belanda pada tahun 1873. Pada tanggal 10 November 1999, Presiden Abdurrahman Wahid menyetujui gagasan untuk membangun basis pemerintahan Islam di Aceh untuk tujuan menjadi barometer NKRI, di mana mayoritas penduduknya beragama Islam (antara 85 dan 90%) pada saat itu. Namun, pemerintahannya tidak didasarkan pada konstitusi Islam. Pada akhirnya mungkin akan didominasi oleh minoritas non-muslim, seperti halnya di negara-negara sekuler lainnya di dunia (Bustami dkk, 2023: 85-87).

Junta nasionalis selalu dikaitkan dengan Aceh. Orang Aceh memakai kekuatan Aceh mereka untuk memahami budaya identitas mereka dalam menghadapi pemerintah. Jiwa Etnonasionalisme Keacehan ini kelihatannya dapat memperteguh identitasnya dari dominasi Pemerintah pusat di Aceh. Selama konflik, Aceh Merdeka atau kemudiannya disebut Gerakan Aceh Merdeka berhasil melemahkan kekuasaan Jakarta, memaksa banyak orang yang menetap di Aceh berasal dari luar Aceh untuk meninggalkan Aceh (Damien Kingsburry, 2002: 1).

Menurut Teungku Hasan M. Tiro ada masyarakat yang tidak nasionalis karena nasionalisme yang dipegang oleh pemerintah pusat, yang terdiri dari mayoritas suku Jawa. Hasan Tiro yang membentuk dasar GAM. Perlawanan yang mungkin tidak nasionalis didorong oleh nasionalisme yang dianut oleh dominasi orang Jawa. Ini menempatkan kepentingan satu kelompok di atas kepentingan kelompok lain. Pada era moderen, orang-orang Jawa yang menguasai pemerintahan dianggap menjajah orang Aceh (Dewojati & Arifin, 2021: 170).

Dominasi nasionalisme etnis mayoritas dan struktur sentralisasi pemerintahan, gerakan penentuan nasib sendiri telah muncul lebih sering di Indonesia. Ini disebabkan oleh fakta bahwa hak minoritas di Indonesia telah dilecehkan secara luas, serta fakta bahwa pemerintah pusat secara tidak langsung menyebabkan konflik sosial dan politik lokal. Ini memicu kampanye etno-nasionalis sebagai akibat dari model nasionalisme Indonesia, terutama yang digunakan oleh rezim Soekarno dan Suharto.

Model ini tidak hanya tidak menarik dan tidak cocok dengan budaya kelompok, tetapi juga menunjukkan bahwa pola ini telah lama ditolak. Untuk membangun persatuan, pemerintah Orde Baru menggunakan alat pemaksa, rezim orde baru melakukan ini dengan mempromosikan visi warga negara dan menghapus oposisi. Indonesia dianggap masih kurang demokratis oleh elit politiknya. Keanekaragaman etnokultural harus dihilangkan. Menjadi Indonesia baru, atau Indonesia Raya, tidak ada lagi perbedaan etnis. Untuk membangun negara yang terpadu, pembangunan negara dianggap sebagai prioritas utama.

Identitas etnis dan regional harus dipolitisasi, dan perbedaan ini harus dipaksakan di bawah pemerintahan Indonesia yang satu. Namun, metode ini lebih berdasarkan nasionalisme daripada identitas etnik atau agama (Peter Kreuzer, 2004: 19-20). Meskipun faktanya tidak ada berkaitan antara munculnya nasionalisme Aceh dengan konflik di Aceh, Solusi militer telah digunakan oleh masyarakat Aceh selama lebih dari dua dekade untuk membantu mereka mengakhiri standar yang digunakan oleh berbagai rezim pemerintah pusat Indonesia. Aceh adalah hasil dari pengalaman penindasan yang menjadi dasar nasionalisme kontemporer.

Kepentingan regional Aceh cenderung meningkat sebagai hasil dari proses kolonial dan pascakolonial, termasuk dorongan untuk identitas regional untuk tujuan peraturan dan pembagian. Tekanan populasi di pusat transmigrasi sering menyebabkan penurunan pasukan tentara dari satu wilayah ke wilayah lain dan pemindahan orang-orang loyal ke wilayah yang diragukan loyalitasnya, seperti di Aceh (Damien Kingsburry, 2002: 70). Kaum etnonasionalis Aceh telah mengalami kesulitan yang lama karena tidak lagi termasuk dalam kerangka patronase negara pusat. Akibatnya, mereka memutuskan untuk menuntut kemerdekaan secara mandiri. Namun, negara tidak dapat memenuhi tuntutan mereka, yang mengecewakan pemerintah pusat. Kasus Aceh mulai menantang kekuasaan Jakarta dan sumber daya sentral (David Brown, 2004: 6).

Perjuangan Aceh Merdeka telah dikembangkan dalam tiga tahapan yang sangat penting Fase pertama, 1976-1989, Aceh Merdeka merupakan gerakan bawah tanah dengan tidak banyak anggotanya. Para pentolan Aceh Merdeka pada fase ini Pemerintah menyebutnya Gerakan Pengacau Liar Hasan Tiro (GPLHT). Pasukan TNI-AD melakukan operasi melawan Aceh Merdeka di bawah komando Kodam I Bukit Barisan. Karena berbagai operasi militer, kesadaran nasional etnis orang Aceh meningkat, memulai embrio gerakan yang telah berkembang lebih jauh. Militer Indonesia mengejar, melakukan serangan bersenjata, dan melakukan pencarian dari satu tinggal di rumah anggota Aceh Merdeka dari tahun 1976 hingga 1989. Ini terjadi di lokasi yang dianggap sebagai basis Aceh Merdeka.

Fase kedua, Aceh tahun 1989 sampai 1998: Selama periode ini berstatus Daerah Operasi Militer (DOM) diumumkan dan disetujui Presiden Soeharto pada tahun 1989. Pada tahun yang sama, kaum gerilyawan muda Aceh Merdeka yang kembali ke Aceh setelah menjalani latihan militer di Tajoura, Libya, sejak 1986 membantu memperkuat struktur komando Aceh Merdeka. Para pentolan Aceh Merdeka pada fase ini oleh pemerintah dilebelkan sebagai Gerakan Pengacau Keamanan (GPK) Dari tahun 1989 hingga 1998, Operasi jarring merah dilakukan. Ribuan anak menjadi yatim, piatu dan yatim piatu, serta banyak rumah yang hancur atau terbakar, sejumlah besar perempuan menjadi janda, dan sejumlah besar menjadi penyandang disabilitas akibat tindak kekerasan, dan jumlah korban sulit dihitung. Jumlah perkiraan antara 3800 dan 35.000 jiwa.

DOM menghentikan perekonomian Aceh, yang telah menyebabkan Kehidupan orang-orang Aceh menjadi sangat memprihatinkan. Selanjutnya, para korban konflik laki-laki dan perempuan, yang merupakan generasi yang kehilangan harapan terhadap NKRI karena tindakan agresif, lalu bergabung dengan Aceh Merdeka. Ini ditunjukkan oleh adanya pasukan tempur perempuan Aceh Merdeka bernama Detasemen Inong Balee, yang terdiri dari janda dan korban perkosaan DOM. Setelah Soeharto berhenti dari Presiden tahun 1998, rakyat menuntut pencabutan DOM. Selain itu, mereka menuntut konsekuensi yang ditimbulkan oleh DOM pada 8 Agustus 1998, pasca orde baru Presiden BJ Habibie mencabut status DOM di Aceh. Tentu saja dengan harapan bahwa banyak kasus kekerasan yang pernah menimpa rakyat Aceh akan berhenti (Kurnia Jayanti, 2013: 56-58).

Pengumuman penarikan pasukan TNI non organik di bacakan di Masjid Baiturrahman Lhokseumawe, oleh Jenderal TNI Wiranto, yang juga merupakan Panglima Tentara Nasional Indonesia juga menjabat Menteri Pertahanan, mengatakan ini sebagai bagian dari upaya kebijakan pemerintah RI saat itu. Saat DOM dicabut, reformasi di Indonesia sedang berlangsung. Setelah runtuhnya orde baru 1998, Aceh Merdeka memasuki fase ketiga, di mana Negara masih terus menggunakan kekerasan. Para pentolan Aceh Merdeka pada fase ini oleh pemerintah dilebelkan sebagai Gerakan Aceh Merdeka. Fase ini diri rakyat Aceh sendiri, nasionalisme Aceh mulai berkembang dan turut meningkatkan popularitas GAM (Chaidar et al., 1999: 75).

Keluarga korban konflik, menunjukkan bahwa orang Aceh dari berbagai daerah telah mengalami banyak pelanggaran HAM berat selama masa DOM. Kekerasan politik serta pelanggaran HAM disebabkan oleh perbedaan tajam antara nasionalisme negara dan nasionalisme etnik. Kisah nasionalis Indonesia yang dominan menganggap "kekerasan" sebagai cara untuk mempertahankan keutuhan negara Indonesia, dan pemisahan dari negara Indonesia dianggap melanggar hukum. Militer (TNI) mewakili negara, dan kepentingan militer membentuk politik Indonesia. Sebaliknya, nasionalisme Aceh mengartikulasikan "kekerasan" berat yang dilakukan militer Indonesia sebagai pelanggaran hak asasi manusia (Susanto T. Handoko dan La Ode Hasirun, 2019: 102).

Peran Kepemimpinan Teungku Hasan M. Tiro Dalam Perjuangan Aceh Merdeka

Aceh Merdeka yang didirikan oleh Teungku Hasan M Tiro tidak pernah mengakui legalitas kemerdekaan Indonesia. "Bangsa Indonesia hanyalah topeng" adalah istilah lain yang digunakan untuk menggambarkan penerus Hindia Belanda yang dipimpin oleh pemerintahannya di Jakarta sebagai istilah pengganti pemerintahan Kolonial Belanda. Karena status hukum yang mengatur kolonialisme dan proses daripada dekolonisasi yang berpusat di Jakarta sebagai Ibukota Republik Indonesia, Kewarganegaraan atau "persatuan" Indonesia tidak memiliki legitimasi hukum yang kuat (Lukman Thaib, 2000).

Nasionalisme Aceh lebih terfokus pada etnik dan eksklusif daripada identitas Indonesia, yang merupakan nasionalisme sipil yang menggabungkan berbagai etnis, suku, dan agama. Ini didasarkan pada gagasan bahwa suku Aceh harus berhubungan dengan delapan atau sembilan suku lain yang ada di sekitarnya untuk membentuk bangsa Aceh. Akibatnya, di Aceh, banyak orang berbicara bahasa Aceh, dengan banyak kelompok bahasa yang berbeda (John Bowen, 2007: 11).

Teori Etnonasionalisme Teungku Hasan M Tiro kemudian membentuk Nasionalisme Aceh, yang kemudian berkembang menjadi gerakan untuk mendapatkan kemerdekaan Aceh bernama Aceh Merdeka, yang sekarang dikenal sebagai Gerakan Aceh Merdeka. Gerakan ini didorong oleh pemikiran Teungku Hasan M Tiro untuk bertentangan dengan dan menentang pemerintah Indonesia dalam upaya mereka untuk mendapatkan kemerdekaan Aceh. Teungku Hasan M Tiro menyadari bahwa perjuangan untuk kemerdekaan hanya dapat dicapai jika rakyat Aceh bersatu menjadi satu bangsa (Teungku Hasan M. di Tiro, 1984: 16).

Upaya Teungku Hasan M Tiro untuk mendirikan gerakan kemerdekaan di Aceh membuat Masyarakat memiliki kesadaran dan menerima Gerakan Aceh Merdeka sebagai alat untuk menyebarkan nasionalisme Aceh. Hanya ada 150 pengikut Teungku Hasan M Tiro saat perjuangan

Aceh Merdeka dimulai pada 4 Desember 1976. Dalam waktu dua tahun, tepatnya pada tahun 1978, GAM memperoleh lebih dari 5000 pengikut yang aktif dan bergabung dengannya untuk berperang melawan Indonesia.

Teungku Hasan M Tiro berlatar belakang pendidikan modern, seorang alumnus Ilmu Hukum UII Yogyakarta dan Hukum Internasional Columbia University New York, kemudian membangun Aceh Merdeka dengan bantuan ahlinya dengan cara yang lebih disiplin dan tertib daripada pendahulunya Teungku Daud Beureueh. Pola rekrutmen diperketat dengan strategi dan taktik gerilya kontemporer, serta doktrinasi untuk pasukan sipil dan tempur modern dengan struktur kepemimpinan yang sangat sentralistik di Aceh Merdeka. Dua aspek yang menarik Teungku Hasan M Tiro adalah bahwa dia membagi Aceh Merdeka menjadi dua struktur: yang pertama adalah bahwa Aceh Merdeka sebagai kekuatan politik negara yang memiliki pengawasan langsung dari wali Negara (Muhammad Madya Akbar, 2009: 54).

Sayap sipil yang dibentuk dalam struktur pemerintahan sipil yang diawasi oleh Swedia mengontrol perjuangan politik Aceh sebagai "negara". Kedua, Aceh Merdeka sebagai sayap militer yang bernama Angkatan Bersenjata Gerakan Aceh Merdeka (AGAM) yang kemudiannya dikenal sebagai Teuntara Neugara Aceh (TNA), dipimpin oleh seorang *Panglima Prang* dan menggunakan struktur Komando militer modern. TNA benar-benar percaya untuk memulai operasi perang di Aceh, tetapi hanya Wali Negara di Swedia yang dapat membuat keputusan politik.

Anggota muda yang dipilih dikirim ke Tajoura, Libya, dari tahun 1987 hingga 1989, untuk belajar tentang taktik perang komando dan ideologi Aceh Merdeka. Perjuangan Aceh Merdeka membantu anak-anak muda, terutama mahasiswa, memahami ideologi nasionalisme Aceh. Pada tahun 1999, gerakan rakyat di bawah naungan Sentral Informasi Referendum Aceh (SIRA) memulai gerakan untuk mengadakan referendum untuk masyarakat Aceh (Saiful Haq, 2010: 224-225).

Target dari Gerakan Aceh Merdeka adalah untuk menentang tindakan otoriter pemerintah pusat terhadap Aceh. Di awal berdirinya, tujuan dari gerakan perlawanan tersebut adalah untuk membuat kehidupan masyarakat Aceh sesuai dengan agama Islam. Namun, nilai-nilai keagamaan itu kemudian diperbarui untuk memodernkan strategi perjuangan yang sesuai dengan perubahan keadaan politik saat itu. Ini karena prinsip keagamaan menjadi lebih dominan dalam Gerakan Aceh Merdeka (GAM), dan sulit untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat internasional (Abu Jihad, 2000: 62).

Islam dan Etnonasionalisme Aceh Dalam Pemikiran Teungku Hasan M Tiro

Ted Robert Gurr dan Barbara Harff menawarkan perspektif baru tentang etnonasionalisme. menyatakan bahwa etnonasionalis adalah kelompok etnis yang besar dan regional yang tinggal di dekat batas negara-negara tetangga, dan upaya politik kontemporer mereka bertujuan untuk mendapatkan otonomi atau negara yang bebas mengatur wilayahnya. Kebanyakan dari mereka punya sejarah perjuangan untuk kemerdekaan atau otonomi untuk mendukung tuntutan politik mereka (Hanita, 2019: 116). Berikut pemikiran-pemikiran Teungku Hasan M. Tiro dalam beberapa bidang diantaranya sebagai berikut:

a) Pemikiran Teungku Hasan M Tiro Dalam Bidang Sosial Keagamaan

Implementasi Islam dalam Etnonasionalisme Aceh Teungku Hasan M Tiro berarti mengadopsi dan mengakui prinsip-prinsip kearifan lokal orang Aceh, serta mempertimbangkan Islam sering memengaruhi budaya Aceh. Sejak awal berdirinya sebagai negara kerajaan Islam, Aceh telah menganut hukum Islam sebagai dasar negara dan filosofi hidup rakyatnya. Dia ingin Aceh menjadi negara yang mandiri yang dapat menerapkan Syariat Islam dan budaya lokalnya. Selain itu, ia juga menginginkan Aceh punya kendali totalitas atas pemberdayaan sumber daya alamnya dan harus dilakukan atas kepentingan bangsa Aceh sendiri, bukan untuk suku atau bangsa lain. Tujuan pengelolaan ini adalah untuk menjaga persatuan dan kesatuan (Teungku Hasan M. di Tiro, 1968: 64-65).

b) Pemikiran Teungku Hasan M Tiro Dalam Bidang Sosial Ekonomi dan Politik

Teungku Hasan M Tiro berpendapat tentang Etnonasionalisme Aceh karena dia tidak puas dengan pemerintah Indonesia karena telah memperlakukan Aceh secara tidak adil dalam pengelolaan hasil produksi sumber daya alamnya. Para penentu kebijakan di Jakarta lebih banyak memakan hasil sumber daya alam Aceh. Misalnya, selama pemerintahan Presiden Soeharto, Aceh menyumbang 14% dari PDB nasional dan hanya menerima 1% dari APBN.

Teungku Hasan M Tiro berpendapat tentang Etnonasionalisme Aceh karena dia tidak puas dengan pemerintah Indonesia karena telah memperlakukan Aceh secara tidak adil ketika pembagian hasil produksi sumberdaya alamnya. Para penentu kebijakan di Jakarta lebih banyak memakan hasil sumber daya alam Aceh. Misalnya, selama pemerintahan Presiden Soeharto, Aceh menyumbang 14% dari PDB nasional dan menerima hasil 1% saja dari jumlah anggaran pendapatan nasional. Hal ini menyebabkan Aceh kurang berkembang dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia karena ketidakadilan dalam pengelolaan sumber daya (Harry Kawilarang, 2010: 158-159).

Teungku Hasan M Tiro kemudian memulai percakapan dengan mendorong kembali cinta Keacehan atau nasionalisme Aceh. Dia berpendapat bahwa pemulihan nasionalisme Aceh akan membuat rakyat Aceh menyadari bahwa martabat dan harkat bahwa Aceh itu bangsa besar dan provinsi yang memberi banyak kontribusi untuk Indonesia telah dilecehkan. Mereka kemudian berkembang menjadi nasionalis Aceh dan berjuang untuk melepaskan Aceh dari pemerintahan Indonesia. Teungku Hasan M Tiro mengatakan bahwa untuk mendapatkan kembali kemerdekaan, kemakmuran, dan kesejahteraan Aceh, semua orang Aceh harus memperjuangkan hak identitas nasionalisme Aceh (Teungku Hasan M. di Tiro, 1968: 64).

c) Pemikiran Teungku Hasan M Tiro Dalam Bidang Sosial Budaya dan Sejarah

Sejarah kejayaan kerajaan Aceh memengaruhi etnonasionalisme Aceh, Teungku Hasan M Tiro ingin meningkatkan kesadaran publik tentang sejarah Aceh dan hukum internasional karena dia menyadari bahwa Aceh dahulu adalah sebelum Indonesia datang, negara berdaulat. Saat ini, wilayah Aceh mencakup setengah Sumatra dan semenanjung Malaysia. Bahkan bagian dari Kalimantan termasuk dalam wilayah ini. Kekuasaan yang sangat besar tidak layak terbatas pada satu negara. Seharusnya Aceh menjadi negara, dengan semua wilayah taklukannya di bawah kendali Aceh (Teungku Hasan M. di Tiro, 1968: 7).

Teungku Hasan M Tiro percaya bahwa Aceh Merdeka bukanlah negara baru; itu telah berkuasa jauh sebelum Indonesia menjadi sebuah negara. Menurutnya, Jika Aceh saat ini dijadikan sebuah provinsi di bawah pemerintahan baru Indonesia, itu akan sangat hina (Husaini M Hasan, 2015: 34). Menurut Teungku Hasan M Tiro dari sudut pandang pengetahuan sejarahnya, wilayah Aceh tidak termasuk kedalam regional Hindia Belanda. Basis utamanya adalah Peta tentang Royaume Dacheh (Kesultanan Aceh) ditulis oleh negara Perancis pada tahun 1873.

Peta Grafik Inggris (22 September 1883) menggunakan Aceh sebagai negara kerajaan dengan wilayah kekuasaannya dan Aceh tidak bukan bagian dari Indonesia. Sebaliknya, berdasarkan peta yang dibuat oleh National Geographich Society pada tahun 1939 yang menunjukkan batas-batas wilayah Indonesia yang diakui oleh United Nation (Perserikatan Bangsa-Bangsa) setelah Perang Dunia II Indonesia mengklaim bahwa Aceh adalah wilayah kolonial Belanda (Teungku Hasan di Tiro, 1984: 93).

Hasan Tiro memiliki perspektif unik tentang Negara karena sejarah Aceh yang kaya dan megah. Menurut Tiro, Aceh telah berkembang menjadi entitas politik yang signifikan, makmur, dan dihormati oleh dunia ratusan tahun sebelum pembentukan Indonesia. Misalnya, Menurut Pada tahun 1873, Aceh-Sumatera mendominasi Natherland-Indie selama tujuh tahun, menurut Larouse Grand Dictionaries Universelle.

Pada dasarnya, Provinsi Aceh merupakan bekas Kerajaan Aceh Darussalam yang berdaulat dan juga diakui oleh seluruh dunia. Sejarah Aceh dibuat oleh Hasan Tiro bukan hanya sebagai identitas dan jati diri, akan tetapi juga sebagai dasar hukum untuk menentang penjajahan, baik itu dijajah oleh negara lain maupun bangsanya sendiri. Menurut pemikiran Teungku Hasan M. Tiro tentang negara bangsa, negara sambungan Kerajaan Aceh harus didirikan berdasarkan kesatuan Islam. di mana Aceh telah menjadi negara yang berdaulat dan merdeka selama bertahun-tahun. Hasan Tiro menggugat penyerahan kedaulatan Aceh kepada RIS oleh Belanda, menggunakan hukum internasional untuk memperkuat gugatannya (Monika Sari, 2022: 29-31).

d) Pemikiran Teungku Hasan M Tiro Dalam Bidang Hukum

Menurut teori Imagined Communities Benedict Anderson, Nasionalisme Teungku Hasan M Tiro berdasarkan negara penerus dari pemerintahan Aceh di masa lampau. Maka komunitas yang diproyeksikan Anderson di Aceh sebagai *succesor state* tidak ada. karena Aceh telah menjadi negara berdaulat dan merdeka selama ratusan tahun dan diakui oleh dunia. Menurut Teungku Hasan M Tiro, Indonesia belum melakukan dekolonisasi Aceh (Kepulauan Melayu) sesuai dengan Piagam PBB (*UN Charter*), dan penyerahan kedaulatannya kepada Belanda adalah ilegal menurut hukum internasional (Damanik, 2010: 47).

Penyerahan wilayah Aceh-Sumatera dan wilayah Nusantara lainnya kepada Indonesia tidak sesuai dengan aturan hukum global karena hanya mengganti nama Hindia Belanda menjadi Indonesia. Menurut prinsip "*eks injuria jus non oritur*", yang berarti keadilan dan hak tidak dapat berasal dari kejahatan. Dalam satu forum lain, dia menyatakan bahwa penjajah Belanda tidak memiliki hak untuk menyerahkan kedaulatan atas Atjeh dan Sumatera kepada siapa pun, terutama penjajah lain, karena orang tidak akan mampu memberikan apa yang bukan hak mereka (Teungku Hasan M. di Tiro, 1985: 10).

Sebagai imperialis Indonesia, Belanda tidak memiliki hak untuk menyerahkan kedaulatan negara-negara sebelumnya pernah dijajahnya kepada mereka. Menurut hukum dunia internasional, "*azas ante bellum*" berarti bahwa kekuasaan penjajah tidak boleh dihapus. mengenai hak hukumnya dan wilayahnya. Dasar hukum internasional yang beradab adalah prinsip bahwa kejahatan tidak dapat menghasilkan keadilan dan hak tidak dapat berasal dari orang yang tidak memiliki hak. Pihak kolonial dihadapkan pada pilihan antara mempertahankan keadaan saat ini atau menyerahkan kedaulatan suatu negara yang pernah mereka jajah (Teungku Hasan M. di Tiro, 1984: 4).

Pengaruh Etnonasionalisme Aceh Terhadap Perjuangan Aceh Merdeka

Pembangunan dan penetrasi kapital memicu nasionalisme etnis di Indonesia dan di seluruh dunia. Setelah kemerdekaan Kosovo, yang dulunya merupakan provinsi Serbia, dengan penduduk mayoritas Albania yang beragama Islam, menunjukkan bahwa masalah Nasionalisme dan etnis Albania tidak pernah berhenti, dan mereka tidak pernah hilang. Api selalu menyala, seperti bara dalam sekam. Jika ada kekuatan yang kuat, terutama dalam hal penyebaran modal asing, api konflik akan meletus (Darsono, 2021: 62).

Menurut perspektif Aceh Merdeka, Aceh masuk ke wilayah Republik Indonesia secara ilegal pada tahun 1945, bukan secara sukarela. Itu dilakukan oleh rezim yang otoriter yang menggunakan wilayah sebagai warga kelas bawah untuk berurusan dengan negara lain, menggunakan mesin negara untuk asimilasi mereka atau mengecualikan mereka dari hak penuh dan status kewarganegaraan mereka. Perjuangan Gerakan Merdeka (GAM) melawan pemerintah Indonesia yang tidak mengakui sejarah, budaya, dan Aceh sebagai bagian dari Indonesia

Kesamaan psikologis dan sejarah sangat penting untuk menegaskan etnonasionalisme Aceh karena keduanya berpendapat pemahaman sejarah Pemilihan wilayah masa lalu harus dipertimbangkan bersama dengan identitas Aceh saat ini (Baogang He and Anthony Reid, 2004).

Secara sosial dan kultural, Aceh berbeda dari daerah lain di Indonesia. Identitas yang berbeda dibentuk oleh budaya Islam Timur Tengah terutama dipengaruhi oleh GAM selama masa perjuangan dari 1976 hingga 2005. Aktivis GAM berusaha merekonstruksi identitas Aceh dengan menekankan kesamaan kultural dan historis. GAM berpendapat bahwa identitas Aceh sangat penting dan berbeda dengan identitas Indonesia (Fitriah, 2020: 3).

GAM memberi dua alasan untuk menegaskan bahwa Aceh adalah negara merdeka. Pertama, Traktat London tahun 1824, perjanjian tahun Diakui sebagai negara merdeka yang diakui oleh Kesultanan Aceh, kerajaan Inggris Raya, dan Belanda pada 1819. Akibatnya, yang sebenarnya bukan Republik Indonesia yang seharusnya mendapatkan kembali kedaulatan, tetapi Kesultanan Aceh. Kedua, tidak ada pemungutan suara yang dilakukan untuk menentukan apakah penduduk Aceh, Sumatra, dan daerah Indonesia lainnya lain ingin menjadi anggota Republik Indonesia. Kolonialisme tidak ada di Hindia Belanda, hanya namanya diganti menjadi "Indonesia", dan "Indonesia" adalah istilah geografis daripada nama asli negara, pulau, atau suatu Individu (Lukman Thaib, 2000).

Etnonasionalisme Aceh adalah menerapkan dan mengakui prinsip-prinsip kearifan lokal dalam masyarakat Aceh, dikenal sebagai etnonasionalisme Aceh. Ini juga berarti bahwa budaya Aceh harus diperhatikan karena keislaman sering mempengaruhinya. Menurut Teungku Hasan M. Tiro, Kemerdekaan berarti mengambil tanggung jawab penuh untuk diri sendiri dan negara kita. Kemerdekaan juga berarti Kita tidak lagi takut menghadapi masalah, kekurangan, atau kematian. Mereka yang telah menemukan cara untuk meninggal dengan hormat tidak dapat lagi tunduk pada perintah atau menjadi budak bangsa lain. Jika seseorang ingin merdeka, mereka harus selalu siap untuk berjuang dan mati untuk itu. Orang yang merdeka itu pejuang. Moyang kita telah mengorbankan, berani, dan syahid untuk menjaga kemerdekaan kita. Jika kita benar-benar keturunan Aceh, kita sekarang harus melakukan yang terbaik untuk mereka (Teungku Hasan di Tiro, 1984: 2). Sehingga semangat etnonasionalis ini dapat menanamkan ideologinya dan mempengaruhi cara berpikir pengikutnya.

Pengaruh ideologi yang digagas Teungku Hasan M Tiro ini bisa dilihat dari sikap beberapa pengikut ideologinya seperti pernyataan Menteri Perhubungan Aceh Merdeka Mr. Tengku Amir Ishak saat diwawancarai di kawasan Chow Kit, Kuala Lumpur. Dalam kesempatan itu dia mengatakan bahwa “kemerdekaan sudah tertanam dihati anggota Aceh Merdeka. Bagi Aceh Merdeka (GAM). Kota Medan berfungsi sebagai dapur, bahan bakarnya berasal dari Amerika dan Malaysia, di Libya kami belajar bagaimana mengolah resep yang dikirim dari Swedia, namun baru Acehlah menjadi panggung kami (Antje Missbach, 2012: 128).

Pengaruh Etnonasionalisme Teungku Hasan M Tiro terhadap pengikutnya bisa di lihat juga dari isi pidato Menteri Kehakiman Aceh Merdeka Reje Linge-Gayo XIX Teungku Haji Ilyas Leube setelah pelantikan kabinet Menteri Aceh Merdeka I di rimba Lhok Nilam, isi pidatonya dengan mengingatkan kembali pejuang Aceh yang syahid di Lhok Nilam dan seluruh rimba Aceh. Reje Linge-Gayo XIX menyampaikannya dalam bahasa Aceh yang fasih dan menyentuh kalbu anggota Aceh Merdeka yang hadir dalam pelantikan itu, suasana saat itu seolah-olah dihadiri oleh para syahid pejuang Aceh. Suasana semakin hening terutama ketika Teungku Ilyas Leube membaca Surah al Baqarah ayat 154 yang bermakna sangat dalam, artinya: "Jangan kamu katakan mati kepada mereka yang gugur dalam perjuangan di jalan Allah masih hidup; mereka tidak mati, tetapi mereka hidup. Hanya kamu tidak mengetahuinya." (Husaini M Hasan, 2015: 76-77).

Menteri Keuangan Aceh Merdeka Teungku Muhammad Usman Lampoh Awe pada saat keluar dari markas Komando di pedalaman Pidie, Aceh menuju ke Kota Medan, Sumatera Utara untuk suatu keperluan perjuangan, ternyata kedatangannya telah diketahui oleh aparat keamanan, setelah di tangkap dia dibawa ke Banda Aceh untuk di adili. Dalam persidangan ini Teungku Muhammad Usman Lampoh Awe mengenakan pakaian adat Aceh dan enggan berbicara dalam bahasa Indonesia, dia meminta haknya untuk berbicara dalam bahasa Aceh atau bahasa lainnya selain

bahasa Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa Nasional berbasis etnis telah tertanam di dalam hati dan pandangan politik masing-masing pengikutnya (Husaini M Hasan, 2015: 81).

4. KESIMPULAN

Teungku Hasan M Tiro menggabungkan konsep Etnonasionalisme dengan gagasan bahwa Aceh harus menjadi Negara yang merdeka berdasarkan Ideologi Nasionalisme Aceh. Mengatakan bahwa masyarakat Aceh memiliki kesamaan, seperti nasionalisme lainnya yang pantas membentuk Aceh sebagai Negara yang merdeka. Nasionalisme Aceh diakui oleh masyarakat Aceh, yang berdampak pada Gerakan Aceh Merdeka. Tidak lama kemudian, Gerakan Aceh Merdeka berkembang menjadi simbol perlawanan masyarakat Aceh dan membentuk organisasi. Gerakan Aceh Merdeka berfokus pada masalah ketidaksamaan sosial yang dihadapi masyarakat Aceh.

Perspektif Teungku Hasan M Tiro di mulai dari kerajaan Aceh, yang percaya kenyataan Aceh merupakan tidak dapat dikolonialisasi oleh negara lain, terutama Belanda. Dia menyatakan bahwa kedaulatan Aceh telah diambil dan dirampas dari penduduknya oleh pemerintah Indonesia. Akibatnya, dia bertekad untuk merebut kembali kedaulatan Aceh melalui pemikiran, konsep, dan tindakan. Seorang pejuang politik yang menemukan dan mengembalikan harga diri Aceh terhadap pemerintah Indonesia. Ideologinya telah ditanamkan pada pengikutnya yang berkontribusi pada pergerakan Aceh Merdeka.

Etnonasionalisme Aceh yang di kenal dengan Nasionalisme Aceh, konsep dan gagasan Teungku Hasan M. tiro yang mendefinisikan jati diri bangsa Aceh. Meskipun ada pendapat yang berbeda tentang tujuan mendirikan negara Aceh merdeka, upaya dan keyakinannya sangat bermanfaat bagi kelangsungan kehidupan politik rakyat Aceh sekarang dan di masa depan. Dengan demikian, kurang lebih perjuangan Teungku Hasan M. Tiro telah menunjukkan sifat asli orang Aceh terutama dalam hal perjuangan untuk mempertahankan kedaulatan Aceh. Hasan Tiro menemukan dan mempertahankan identitas bangsa Aceh serta memperkenalkannya kepada dunia Internasional.

REFERENSI

- Abu Jihad. (2000). *Pemikiran-Pemikiran Politik Hasan Tiro dalam Gerakan Aceh Merdeka*. Titian Ilmu Insani.
- Antje Missbach. (2012). *Politik jarak jauh diaspora Aceh: suatu gambaran tentang konflik separatist di Indonesia*. Penerbit Ombak.
- Baogang He and Anthony Reid. (2004). Special issue editor's introduction: four approaches to the Aceh question. *Asian Ethnicity*, Volume 15, No. 3.
- Bustami dkk. (2023). Husaini M. Hasan Dan Konsep Islamic State Dalam Konteks Sosial Politik Aceh. *SINTHOP: Media Kajian Pendidikan, Agama, Sosial Dan Budaya*, Vol. 2, No. 2, 80–89.
- Al Chaidar dkk. (1999). *Aceh Bersimbah Darah Mengungkap Penerapan Status Daerah Operasi Militer (DOM)*. Pustaka Al-Kautsar.
- Ahmad Taufan Damanik. (2010). *Hasan Tiro Dari Imajinasi Negara Islam ke Imajinasi Etno-Nasionalis*. Friedrich Ebert Stiftung dan Acheh Future Institute.
- Damien Kingsburry. (2002). *Interest, nations, and the state development: inability in archipelagic Southeast Asia*.
- Darsono. (2021). Penetrasi Kapital Dan Bangkitnya Nasionalisme Etnis Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, Vol. 1, No. 2, 63.
- David Brown. (2004). *Why independence? The instrumental and ideological dimensions of Acehnese nationalism*. Asia Research Center.
- Dewojati, C., & Arifin, M. Z. (2021). Biopolitik Dan Krisis Kedaulatan Dalam Novel Lampuki Karya Arafat Nur. *Jurnal Pengajian Melayu*, Vol. 32, No. 1, 156–175.
- Husaini M. Hasan, Sp. OG. (2015). *Dari rimba Aceh ke Stockholm: [catatan] Husaini M. Hasan, Sp. OG., ketika bersama, Teungku Hasan M. di Tiro, BS, MA, Ph. D., LL. D. (Proklamator Aceh Merdeka)*.

Batavia Publishing.

- Fadlullah, N. (2020). Positivisasi Hukum Islam dan Persinggungannya dengan Kelompok Etnonasionalis di Aceh. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, Vol. 54, No. 1, 1–26.
- Fitriah, A. (2020). Identitas Islam Dan Pendidikan Di Era Otonomi Khusus Aceh. *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Dan Keagamaan*, Vol. 18, No. 1, 1–18.
- Hanita, M. (2019). Evolusi dan Adaptasi Gerakan Kebangsaan Orang Papua dari Nasionalisme ke Etnonasionalisme. *Jurnal Keamanan Nasional*, Vol. 5, No. 2, 111.
- Harry Kawilarang. (2010). *Aceh Dari Sultan Iskandar Muda Ke Helsinki*. Bandar Publishing.
- John Bowen. (2007). *The new anthropology of ethnicity and identity and why it matters for Aceh and Indonesia. First International Conference of Aceh and Indian Ocean Studies*. ARI: BRR Singapore-Indonesia.
- Kurnia Jayanti. (2013). Konflik Vertikal Antara Gerakan Aceh Merdeka Di Aceh Dengan Pemerintah Pusat Di Jakarta Tahun 1976-2005. *Al-Turās*, Vol. 19, No. 1, 49–70.
- Lukman Thaib. (2000). Aceh's case: Possible solution to a festering conflict. *Journal of Muslim minority affairs*, Vol. 20, No. 1, 105–110.
- Monika Sari. (2022). Hasan Tiro: Sejarah Aceh Sebagai Pijakan Ideologi Dalam Aceh Merdeka. *Historia: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, Vol. 7, No.1, 26–35.
- Muhammad Madya Akbar. (2009). *Aceh Meretas Jalan Damai Menuju Masa Depan*. Publisher Lentera Demokrasi.
- Peter Kreuzer. (2004). *Framing Violence. The Role of Culture and State Institutions. Asian Perspectives*.
- Putra, & Yusuf, R. (2020). Nasionalisme etnis Tionghoa di Kota Banda Aceh. *Jurnal Civic hukum* Vol. 5, No. 2, 157–165.
- Saiful Haq. (2010). “*Epilog: Seulawah di Ujung Barat Republik*”, dalam *Transformasi Gerakan Aceh Merdeka*. Friedrich Ebert Stiftung.
- Santoso, G., Khairunnisa, N., Azzahra, N., Aulia Adisti, S., & Muhamadiyah Jakarta, U. (2023). Filsafat Konten Nasionalisme, Patriotisme, dan Perjuangan Untuk Generasi Z Bangsa Indonesia. *Jupetra*, Vol. 2, No. 2.
- Suadi Zainal. (2022). Keistimewaan Aceh dan Pembangunan Perdamaian dalam Tinjauan Sosio Historis. *Jurnal Sosiologi USK Media Pemikiran & Aplikasi*, vol. 16, No. 1, 87–104.
- Susanto T. Handoko dan La Ode Hasirun. (2019). Relasi Nasionalisme Etnik, Nasionalisme Negara dan Nasionalisme Kewarganegaraan di Papua. *Jurnal Sejarah Citra Lekha*, Vol. 4, No. 2, 100–110.
- Teungku Hasan di Tiro. (1984). *The Price Of Freedoms: The unfinished diary of Teungku Hasan di Tiro*. National Liberation Front Of Aceh Sumatra.
- Teungku Hasan M. di Tiro. (1968). *Atjeh Bak Mata Donja*. Institute Atjeh di Amerika.
- Teungku Hasan M. di Tiro. (2014). *Aceh di mata dunia*. Bandar Publishing.
- Teungku Hasan Muhammad di Tiro. (1985). *Indonesian Nationalism : a western Invention to Subvert Islam and Toprevent Decolonization of the Dutch East Indie*. National Liberation Front of Aceh Sumatera.
- Teungku Hasan M. di Tiro. (1985). *Perkara & Alasan Perjuangan Angkatan Aceh - Sumatera Merdeka*.
- Teungku Hasan M. di Tiro. (1984). *Masa Depan Politik Dunia Melayu (Cetakan Ketiga)*. Kementerian Penerangan Aceh-Sumatra.